

**PERAN ELIT PARTAI DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF 2019 (STUDI KASUS PARTAI AMANAT DAPIL 1
KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik

OLEH :

ASNUL MUFIDA AMIR

E11115301

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN ELIT PARTAI DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF 2019
(STUDI KASUS PARTAI AMANAT DAPIL 1 KOTA MAKASSAR)**

Di susun dan diajukan oleh :

ASNUL MUFIDA AMIR

E 111 15 301

Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal :

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP.196511091991031008



Andi Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP. 19731122 200212 1001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. Ph. D.
NIP. 196212311990031023

3/21

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

PERAN ELIT PARTAI DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF 2019

(Studi Kasus Partai Amanat Nasional Dapil 1 Kota Makassar)

Di susun dan diajukan oleh :

ASNUL MUFIDA AMIR

E 111 15 301

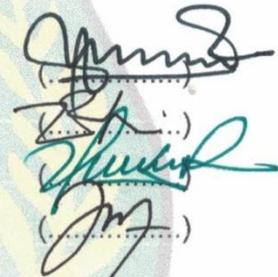
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.
Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si
Anggota : A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si
Anggota : Ummi Suci Fathia. B, S.IP., M.IP



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asnul Mufida Amir

NIM : E11115301

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang pendidikan : Strata-1 (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Elit Partai dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif (Studi Kasus Partai Amanat Nasional Dapil 1 Kota Makassar)**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



(Asnul Mufida Amir)

ABSTRAK

ASNUL MUFIDA AMIR, E11115301. Skripsi yang berjudul “Peran Elit Partai Dalam Penentuan calon Anggota Legislatif” yang disusun di bawah bimbingan bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Andi Naharuddin S,IP M.Si selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran elit Partai Amanat Nasional Kota Makassar pada saat proses penetapan daftar calon tetap anggota legislatif partai amanat nasional Kota Makassar Dapil I yaitu kecamatan Makassar, Ujung Pandang, dan Rapoccini. Dengan rumusan masalah, Bagaimana peran elit partai Amanat Nasional (PAN) dalam proses penentuan daftar Caleg Dapil 1 di Kota Makassar 2019? Serta Bagaimana dinamika dalam penentuan daftar calon anggota legislatif Dapil 1 di Kota Makassar 2019?

Dalam penelitian ini Teori yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu ini teori elit dan konsep rekrutmen politik. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, khususnya pengurus DPD dan DPW Partai Amanat Nasional yang terlibat dalam proses penetapan calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran elit Partai Amanat Nasional Kota Makassar dalam menentukan calon anggota legislatif yaitu: Membuat dan Menjalankan mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional, elit Partai Amanat Nasional sebagai Elit Penentu dimana hampir semua keputusan dikembalikan kepada ketua DPD dan DPW Partai Amanat Nasional Kota Makassar. Adapun dinamika dalam penetapan daftar calon sementara yaitu terdapat 21 nama namun beberapa nama yang sebelumnya tidak mendaftarkan diri kedalam daftar calon sementara kemudian tiba-tiba dimasukkan kedalam daftar calon tetap dan semua merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan elit partai .Partai Amanat Nasional dalam menetapkan daftar calon tetap tidak terpengaruh oleh kelompok eksternal diluar partai.

Kata Kunci : *Elit, PAN Kota Makassar, Pileg 2019*

ABSTRACT

ASNUL MUFIDA AMIR, E11115301. Thesis entitled "The Role of Party Elites in Determining Legislative Member Candidates" which was compiled under the guidance of Prof. Dr. Armin, M.Si as a supervisor I and Mr. Andi Naharuddin S, IP M.Si as supervisor II.

This study aims to determine the role of the Makassar City National Mandate Party elite during the process of determining the final list of candidates for the legislative members of the Makassar City National Mandate Party, namely Makassar, Ujung Pandang, and Rapoccini districts. With the formulation of the problem, what is the role of the elites of the National Mandate (PAN) party in the process of determining the list of Electoral Election Candidates in Makassar City 2019? And what are the dynamics in determining the list of legislative candidates for Electoral District 1 in Makassar City 2019?

In this study, the theory used in conducting the analysis is the elite theory and the concept of political recruitment. The research method used is a qualitative research design with a descriptive research type. Data collection was carried out using in-depth interviews. The location of the research was carried out in Makassar City, especially the DPD and DPW administrators of the national mandate parties who were involved in the process of determining candidates for legislative members of the Makassar City National Mandate Party.

The results showed that the role of the Makassar City National Mandate Party elite in determining legislative candidate members, namely: Creating and Running a recruitment mechanism for prospective legislative candidates for the National Mandate Party, the National Mandate Party elite as a Deciding Elites where almost all decisions are returned to the chairman of the DPD and DPW of the Mandate Party Makassar City National. As for the dynamics in determining the provisional candidate list, namely there are 21 names but several names that previously did not register themselves on the provisional list of candidates were suddenly included in the final list of candidates and all were people who had close relations with the party elite. establishing a list of candidates remains unaffected by external groups outside the party.

Keywords : *Elite, PAN City of Makassar, Pileg 2019*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Elit Politik.....	12
2.2 Konsep Rekrutmen Politik	15
2.3 Kerangka Pikir	20
2.4 Skema Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe dan Penelitian Dasar	23
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Jenis Dan Sumber Data	24

3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	27

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1.	Demografi	Kota	
	Makassar		
			29
4.1.1	Demografi	Penduduk	Kota Makassar
			30
4.1.2	Gambaran	Dapil	1 Kota
	Makassar		
		
			31
4.1.3	Daftar		Jumlah
	Pemilih		
		
			34
4.1.4	Hasil Perolehan Suara	dan Kursi Partai Politik di Kota	
	Makassar		Pemilu
			2019
		
			35

4.2. Profil Partai Amanat Nasional

4.2.1. Sejarah Partai Amanat Nasional Kota Makassar	37
4.2.2. Komposisi Dewan Pengurus Partai Amanat Nasional	39
4.2.3. Jumlah Calon Anggota legislative dan perolehan suara caleg Partai Amanat Nasional Kota Makassar 2019 Berdasarkan Daerah Pemikiran	40
4.2.4. Perolehan suara dari pemilu	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Dinamika Penentuan Calon Legislatif Dapil 1 Kota Makassar	43
5.1.1 Upaya Calon	45
5.1.2 Upaya Kelompok Kepentingan	50
5.1.3 Upaya Kelompok Penekan	54
5.1.4 Tokoh Masyarakat	56

5.2. Peran Elit Partai Amanat Nasional dan Penentuan Caleg Dapil 1 Kota Makassar	58
5.2.1 Peran Tim Seleksi	59
5.2.2. Peran Ketua DPD dan Peran Ketua DPW	64
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	72
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN	xvi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Serta Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Amir Ambo tang SP.M.M. dan Ibunda Muliati Rajab yang telah melahirkan serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan doa yang terus mengalir untuk keberhasilan penulis dalam meraih tujuan hidup. Kepada saudaraku satu-satunya Muhammad Maulana Amir,Sp yang mendampingi penulis, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil. Sehingga Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Politik (S.IP.) pada Program Studi SI Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
3. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku pembimbing 1 dan bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa

membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

4. Bapak Drs. H.A. Yakub, M.Si. P.hD. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Andi Ali Armunanto S,IP M,Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik, Alm. Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Alm. Dr. Basyir Syam, Dr Ariana yunus, Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Dr. Muhammad Saad, Dr. Gustiana S.IP.M.SI., Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Haryanto, S.IP. MA., dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
7. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik Pak Mursalim, Ibu Hasna, dan Pak Adit yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak dan ibu.
8. Kepada Sahabat Anak Gajah, Lalis, Susidung, iinbol, Nitabolla, Swity, dan Siskiu, yang selalu memberi semangat dan juga mengirimkan doa.
9. Saudara-saudara Delegasi 2015, Wahyudin, Syifa, Ayu, Rahmat besar, Asrunil, Liza, Nisa, Galank, Pira, Astmha, Fichri, Poces, Ningrat, Lembang, Dika, Dery, Evita, Syawal, Ime, Ramma Kecil,

Syarif, Dianto, Jhony, Vivi, Marwah, Ubay, Tias, Nindy, Adi, Dilla, Kamal, Ical, Juned, Sibga, Mira, Arigie, Ifan, ekky Terima kasih telah menjadi sodara yang baik dalam perjalanan empat tahun belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.

10. Terima kasih kepada para editor penulis yang selalu mengoreksi dan senantiasa membaca revisian skripsi penulis Syarif Ali Khan S.IP, Muh Fichriyadi Hastira S.IP, Andi Marwah Hermansyah, Ashari kara S.IP
11. Kepada kakanda Akbar Najemuddin S.IP yang telah memberi ruang diskusi, saran dan masukan kepada penulis
12. Kepada Nur Rifan Rahmat ketua angkatanmu terima kasih telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis sampai saat ini .
13. kepada Fiqril Haqiqi Andika SM terima kasih selalu mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan revisian dan selalu menyemangati penulis mengerjakan skripsi ini
14. Kepada sahabat “BAN SEREP” Hilmy, Akram, Desi, Anggi, Paula, terima kasih yang selama ini tak henti-hentinya membagikan tawa dan dukungannya kepada penulis

15. Kepada sahabat "Zigop" Aulia, Ade. Adriana, Riska, Yundha terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis.
16. Kepada teman-teman UBUR-UBUR SQUAD (KKN REGULER BARRU 99, DESA SIAWUNG) Andi, Kiki, Diana, Harmin, Ayu yang dipertemukan pada saat menjalankan KKN Gelombang 99. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan dan waktu selama KKN dan telah memberikan kenangan terindah dengan mengenal kalian.
17. Terima kasih kepada Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa dan para senior-junior di Himapol yang senantiasa membantu dan mendukung penulis.
18. Terima Kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis

Makassar 11 Februari 2021



Asnul Mufida Amir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar dari demokrasi yang berarti merujuk pada pemikiran John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.¹

Salah satu poin yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota Makassar adalah mengenai rekrutmen calon anggota legislatif. Para peserta (calon anggota legislatif) yang tersedia dalam pemilihan umum adalah hasil seleksi dari partai politik. Hal ini diatur oleh Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau Kota Makassar.
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

¹ Farahdiba Rahma Bachtiar.,PEMILU INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REFRESENTASI1. Jurnal Politik Profetik *Volume* 3 Nomor 1 Tahun 2014.Hal 2

Pemilu merupakan suatu proses dimana seseorang menentukan calon pemimpin, dengan adanya Pemilihan Legislatif (selanjutnya disebut Pileg) partai politik akan menjalankan salah satu fungsi pentingnya yaitu rekrutmen politik. Dalam menyusun calon legislatif biasanya tidak lepas dari peran elit partai yang menentukan calon legislatif yang akan mewakili partainya pada Pileg.

Di sisi lain pemilu merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen. Oleh karena itu, sebagai arena kompetisi yang adil, seharusnya pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap (teruji) oleh rakyat, sehingga efektivitas kompetisi tersebut dapat dipelihara. Terlalu banyak kontestan yang ikut kompetisi, akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi tersebut, apalagi jika standar kualitas kontestan tersebut sangat beragam.²

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, dan anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk biasanya dengan cara konstitusional melalui pemilihan umum memperoleh kekuasaan politik dan memper-tahankan jika sudah diperoleh guna melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh mereka.³ Peran partai dalam pemilu sangat

² Jurnal Konstitusi "mengagas sistem pemilihan umum diindonesia "2009,hal 11

³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1988 hal 403

penting melihat dari peran partai itu sendiri, salah satunya sebagai lembaga rekrutmen politik dalam mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Demokrasi telah menjadi spektrum dari sistem politik negara-negara yang ada di dunia. Indonesia telah menjadi negara yang mempunyai laju percepatan arus demokratisasi cukup signifikan ini, hal ini telah mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia sehingga Indonesia selalu mendapatkan posisi yang amat strategis dalam percaturan politik global.⁴

Perubahan penting yang dialami Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi adalah munculnya berbagai macam partai politik. Di era reformasi setelah dibukanya kebebasan mendirikan partai politik, nuansa politik bangsa sangat didesaki oleh aktivitas partai politik. Berbagai motif pendirian partai politik mendasari kehadiran partai-partai itu, seperti : (1) partai hadir atas dasar keinginan orang-orang yang berkuasa, (2) motif ekonomi, orang masih memimpikan bahwa partai politik adalah tempat mengeruk keuntungan dan memperkaya diri, keluarga, dan kelompok, (3) motif kekuasaan pragmatis dengan berbagai alasan, misalnya ideologi, gagasan, dan struktur yang baru. (4) Transaksional, (5) Bargaining Position. Kondisi ini menyebabkan partai tidak lebih sebagai event organizer dari orang-orang yang haus akan kekuasaan.⁵

Pada pemilihan umum tahun 2019 menjadi pemilihan umum serentak

⁴ Jurnal IDEA International "Penilaian Demokratisasi di Indonesia.pdf, disampaikan pada forum untuk reformasi demokratis ,2008, hal 58

⁵ Efriza, Political Explore: Sebuah Kajian ilmu Politik, Bandung : Alfabeta 2012, hal. 351- 352

yang pertama kalinya dilaksanakan bersamaan dengan Pilpres tahun 2019 di Indonesia. Setiap partai politik akan menyiapkan kader terbaiknya untuk ikut dalam Pada pemilihan umum tahun 2019, tentunya pemilihan kader-kader terbaik partai melalui suatu tahapan panjang yang tentu saja melibatkan berbagai pihak terkait salah satunya adalah elit partai itu sendiri.

Secara ideal partai politik harus melaksanakan fungsi rekrutmen politiknya dengan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat dengan merekrut individu-individu yang memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang baik. Partai politik harus melaksanakan rekrutmen yang terbuka dan demokratis. Tetapi dalam prakteknya seringkali bertentangan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan daftar Calon Legislatif (selanjutnya disebut Caleg) keterlibatan elit partai seringkali membuat proses rekrutmen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keterlibatan para elit politik dalam penyusunan daftar calon erat kaitannya dengan faktor kekerabatan dan faktor lainnya yang dianggap dapat menguntungkan kedua belah pihak sehingga mengesampingkan hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam tahap penyusunan Calon anggota legislatif .

Pada pemilu legislatif DPRD 2019 Kota Makassar terdapat 16 partai Politik yang akan bersaing dan menyiapkan kadernya dalam menghadapi pesta politik lima tahunan tersebut salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (selanjutnya disebut PAN) yang notabene telah lama dikenal dalam kancah politik Indonesia. Partai Amanat Nasional terbilang menjadi

partai yang cenderung disoroti di daerah Kota Makassar. Dengan basis massa masyarakat muhammadiyah dan berideologi islami, maka target pemilih Partai Amanat Nasional tertuju pada masyarakat tersebut. Meskipun begitu, strategi pemenangan Partai Amanat Nasional dalam meraup suara melakukan strategi yang bersifat merata dimana target masyarakatnya dilandaskan pada basis massa yang dimiliki (muhammadiyah).

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2019 Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Makassar mengalami peningkatan perolehan kursi dari pemilu sebelumnya tahun 2014. Dimana Partai Amanat Nasional pada pileg 2014 hanya berhasil memperoleh 4 kursi sementara hasil pileg 2019 memperoleh 5 kursi. Peningkatan perolehan kursi Partai Amanat Nasional Kota Makassar pada pemilihan 2019 tentunya tidak lepas dari proses rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif yang ditetapkan sebagai calon tetap.

Hal yang menarik terlihat pada proses penyusunan daftar calon sementara partai Amanat Nasional Dapil 1 Kota Makassar, dimana pada saat proses pendaftaran ditetapkan 21 nama yang terdaftar sebagai daftar calon sementara. Dari 21 calon sementara Dapil I yang ditetapkan oleh Partai Amanat Nasional Kota Makassar. terdiri dari pengurus 5 orang, kader 7 orang, dan non kader sebanyak 9 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Daftar Calon Sementara Partai Amanat Nasional Dapil 1 Kota Makassar

Sumber: Partai Amanat Nasional Kota Makassar 2019

No	Nama	Pengurus	Kader	Non Kader
1	H. Zaenal Beta Dg Beta., S.Sos., M.Si.	✓		
2	Ahmad Pasmira		✓	
3	Desrianto	✓		
4	Rasmi Ridjang Sikati	✓		
5	Mudhakkir		✓	
6	Andi Fakhrudin		✓	
7	Aziz Jaya		✓	
8	Hafifa Indriyani		✓	
9	Halim Kamaruddin			✓
10	Andi Muh.Fiqram Rasyid			✓
11	Drs.H.Muh Abduh			✓
12	Yaumul Akhir F		✓	
13	Rohani	✓		
14	Harman			✓
15	Marliani			✓
16	Andi Arwin			✓
17	Amiruddin Majid			✓
18	Askari Umar Tatta	✓		
19	Andi Hidayat			✓
20	Dian Baco			✓
21	Irwan Tahir		✓	

Dari 21 nama diatas berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum bahwa kuota daftar calon tetap anggota legislatif Dapil I maksimal 9 orang. Maka pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Makassar melakukan penjaringan dari 21 nama yang terdaftar kemudian ditetapkan 9 nama yang terdiri dari pengurus 3 orang dan kader 6 orang. Nama tersebut dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Nama-Nama Daftar Calon Tetap Partai Amanat Nasioanl Dapil 1
Kota Makassar 2019.

No	Nama	Pengurus	Kader
1	H Zaenal Dg.Beta, S.sos, M.si	✓	
2	Dra. Andi Sitti Rahmatiah	✓	
3	Azis Jaya	✓	
4	Irwan Tahir, S.Kep		✓
5	Dedi Amiruddin Karded, SE		✓
6	Yaumil Akhir F, SE		✓
7	Hafifa Indriyani		✓
8	Matturungan DG Sore S.Pd, M.Pd.		✓
9	Syukran		✓

Sumber: Partai Amanat Nasional Kota Makassar 2019

Berdasarkan daftar calon tetap Partai Amanat Nasional Kota Makassar Dapil I dari 9 nama yang ditetapkan terdapat beberapa nama yang sebelumnya tidak masuk sebagai kandidat di daftar calon sementara yaitu Dra. Andi Sitti Rahmatiah, Dedi Amiruddin Karded S.E., Matturungan DG Sore S.Pd. ,M.Pd., Syukran. Masuknya 4 nama yang sebelumnya tidak

terdapat di daftar calon sementara nampaknya ada keterkaitan dengan kepentingan sekelompok elit penentu di dalam internal Partai Amanat Nasional Kota Makassar.

Penyebab keempat nama tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Makassar serta salah satu diantaranya merupakan anak dari ketua DPW PAN sulsel. Dapat dikatakan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Kota Makassar dalam menetapkan calon anggota legislatif khususnya Dapil I masih dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elit partai yang pada akhirnya mengabaikan sistem mekanisme yang telah ditetapkan oleh keputusan internal partai tersebut.

Partai Amanat Nasional apabila dihadapkan antara menjalankan mekanisme partai atau mengejar popularitas figure maka Partai Amanat Nasional Kota Makassar lebih mengutamakan figur- figur populis yang memiliki basis massa untuk dicalonkan dari pada mencalonkan kadernya yang telah lama mengabdikan kepada partai. Hal ini bisa dilihat dari munculnya nama Syukran di daftar calon tetap Partai Amanat Nasional yang sebelumnya tidak diakomodir dalam pencalonan sementara. Hal ini mengidentifikasi bahwa perekrutan yang dilakukan Syukran karena orang tuanya yang menjabat sebagai ketua DPW Partai Amanat Nasional.

Sementara 3 nama Dra. Andi Sitti Rahmatiah, Dedi Amiruddin Karded SE, Maturungan DG Sore s.pd,mpd merupakan figur yang

dianggap memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Kondisi demikian menggambarkan bahwasanya partai amanat nasional Kota Makassar khususnya Dapil 1 lebih melihat figur yang potensial menang dari pada figur dari kader partai. Hal ini sebenarnya lasim dilakukan oleh partai-partai politik yang fokus dalam orientasi memperoleh kemenangan pada pemilihan.

Berangkat dari hal tersebut, penulis menilai Partai Amanat Nasional dalam menentukan daftar calon tetap berorientasi pada usaha memenangkan pemilu 2019 dibandingkan untuk memperkuat institusi, yang mana beberapa calon tetap di atas merupakan keluarga maupun kolega elit partai sehingga beberapa kader dinilai penulis tidak ternaungi. Untuk mempelajari dan mengkaji lebih jauh terkait peran elit partai, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Elit Partai Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif 2019 (Studi Kasus Partai Amanat Dapil 1 Kota Makassar)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran elit partai Amanat Nasional (PAN) dalam proses penentuan daftar calon anggota legislatif Dapil 1 di Kota Makassar 2019?
2. Bagaimana dinamika penentuan daftar calon anggota legislatif Dapil 1 di Kota Makassar 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian

ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran elit partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dalam proses penentuan daftar calon anggota legislative Dapil 1 di Kota Makassar 2019. Serta bagaimana dinamika penentuan daftar calon anggota legislatif Dapil 1 di Kota Makassar 2019 tersebut

1. Untuk mengetahui peran elit Partai Amanat Nasional dalam proses penentuan daftar calon anggota legislative Dapil 1 Kota Makassar ?
2. Untuk mengetahui dinamika penentuan daftar calon anggota legislatif Dapil 1 di Kota Makassar 2019 ?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat akademik

- a. Sebagai bahan acuan para peneliti yang ingin meneliti terkait peran elit partai dalam penentuan calon anggota legislatif.
- b. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan tentang peran elit partai, serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 di Universitas Hasanuddin Makassar.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan wawasan untuk menambah pengetahuan serta informasi mengenai peran elit partai dalam menghadapi pemilu 2019 di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini lebih memperjelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

2.1. Teori Elit

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai kelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khusus golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Elit Partai Politik adalah kelas penentu yang memiliki kemampuan tertentu dalam melakukan penggalangan massa untuk menjadi pendukung suatu Partai Politik.

Robert D. Putnam menyatakan bahwa secara umum ilmuwan sosial membagi dalam tiga sudut pandang. Pertama, sudut pandang struktur atau posisi. Pandangan ini lebih menekankan bahwa kedudukan elit yang berada pada lapisan atas struktur masyarakat yang menyebabkan mereka akan memegang peranan penting dalam aktivitas masyarakat. Kedudukan tersebut dapat dicapai melalui usaha yang tinggi atau kedudukan sosial yang melekat, misalnya

keturunan atau kasta.⁶

Elite menurut Suzzana Keller, berasal dari kata eligere, yang berarti orang –orang yang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok atau kelompok kecil orang-orang yang terpandang dan berderajad tinggi, Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari pada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya.⁷

Suzanne Keller membagi tipe kepemimpinan sosial dapat dibagi menjadi 5⁸ :

1. Kasta penguasa

Membina orang melalui reproduksi biologis dan dengan *prestise* yang tinggi. Kasta penguasa terbentuk terpisah dengan agama, kekerabatan, bahasa, daerah tempat tinggal, kedudukan ekonomi serta aktivitas jabatan.

2. Aristokrasi

Terbentuk melalui ikatan keluarga melalui kekerabatan dan kekayaan, aristokrasi menyukai jabatan politik dan perang Berdasarkan analisa elite Putnam dan Suzanne Keller seperti diurai diatas yang dimaksud dengan elite penentu,

⁶ Jayadi Nas, Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal, h. 37.

⁷Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern, PT. Raja Grafindo persada :jakarta, 1995, hlm 33.

⁸ Siti Rohmatul Ainillah, " Elite Politik Dalam Kontenstasi di Desa dengan menggunakan studi Peran Blater dalam Pilkades di desa Banjar, Galis, Bangkalan Madura", jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, hlm 286

alternatifnya adalah :

- (1). Orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu organisasi;
- (2). Orang yang memiliki pengaruh dan reputasi besar dalam organisasi dibanding orang lain;
- (3). Orang yang memiliki kontribusi besar dalam pengambilan keputusan dalam organisasi.⁹

Dalam dinamika partai politik di aras lokal, kita temukan “orang kuat partai” yang secara individu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai. Orang inilah yang disebut Suzanne Keller sebagai elite penentu. Orang kuat partai ini secara individual mampu mengekspresikan pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elite partai (ketua umum) tetapi meski hanya sebagai pengurus harian partai karena yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mumpuni dibanding orang lain maka orang ini bisa menjadi orang penting di partai.¹⁰

Orang kuat partai bisa hadir karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, kelebihanannya mengendalikan dan memerintah partai dapat di pergunakan untuk hal-hal positif tetapi juga mungkin diperuntukkan bagi tindakan-tindakan negatif. Ada dua jenis orang kuat partai, orang kuat yang buruk dalam memerintah partai (*bad strongmen*) dan orang kuat

⁹ Jainuri, “ORANG KUAT PARTAI DI ARAS LOKAL : BLATER VERSUS LORA DALAM PERCATURAN POLITIK. Hal 4.

¹⁰ Ibid hlm 9

yang baik dalam memerintah partai (*good strongmen*). *Bad strongmen* adalah orang yang mengapresiasi kekuasaannya di partai dengan cara-cara non demokratis, tidak menafsirkan kekerasan dan tidak menaburkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan *good strongmen* adalah orang kuat yang mengapresiasi kekuasaannya di partai dengan cara- cara demokratis, tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Dalam perkumpulan politik orang kuat ini tidak sendiri, ia dilingkupi oleh sekelompok orang yang bersatu dan memiliki karakter yang sama seperti tengara Pareto, Michel, Mosca : “Secara internal elite bersifat homogen, bersatu, memiliki kesadaran kelompok. Individu dalam kelompok elit itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip dan memiliki nilai, kesetiaan, kepentingan yang sama”.¹¹

2.2 konsep rekrutmen politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

¹¹ Ibid hlm 10

Salah satu fungsi utama partai politik dalam hal pemilu dan demokrasi adalah melakukan rekrutmen ini menjadi proses penentu oleh partai politik atau pintu masuk terjadinya proses sirkulasi elit dalam perebutan posisi jabatan politik.

dalam berbagai teori dijelaskan oleh berapa pemikir terkait atau bentuk sistem dalam melakukan rekrutmen.

Dalam studi Pippa Norris¹² juga menyebutkan ada berbagai tahapan yang dilakukan dalam proses rekrutmen khususnya partai politik dalam menjalankan proses organisasi dalam menentukan calon wakil dalam parlemen atau pemerintahan adalah tahapan sertifikasi, tahap nominasi, dan pemilihan (Katz dan Crotty: 2006). Dari beberapa syarat utama yang memenuhi syarat atau layak, siapa yang dicalonkan dan siapa yang mencalonkan. Sehingga pada proses penentuan yang dilakukan oleh partai ada pada bagaimana mekanisme yang dilalui partai dalam mencari dan menetapkan calon itu sendiri.¹³

Pada proses rekrutmen biasanya meliputi tiga tahap yaitu tahap sertifikasi, nominasi, dan tahap pemilihan. Tahap sertifikasi merupakan tahap awal atau pendefinisian, yang antara lain mencakup penentuan kriteria yang dikehendaki, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma-norma sosial. Sementara tahap nomisasi berkaitan dengan

¹² Pippa Norris, *Building Political Parties: Reforming Legal Regulations And Internal Rules*. Report Commissioned By International IDEA 2004, Harvard University.

¹³ Jurnal Politik Muda "Polarekrutmen Partai Nasional Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang", Hlm 3

ketersediaan (kader-kader partai) yang memenuhi syarat dan posisi yang akan diisi. Tahap selanjutnya berkaitan dengan proses pemilihan, yang umumnya berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang dilibatkan untuk memilih, dan bagaimana cara menentukan siapa yang menang

Teori Rekrutmen menurut Almond dan Powell. Rekrutmen politik adalah suatu proses dimana terjadi penseleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi.

Teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu :¹⁴

1. Prosedur tertutup, artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang.
2. Prosedur terbuka, artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di dalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER : Langsung Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil.

Di dalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu kita ketahui secara luas kajian-kajiannya antara lain:¹⁵

¹⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005) hal.200-203

¹⁵ Almond and Coleman, hlm. 140

A. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu. Partai politik merekrut seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan dengan melihat distribusi sumber-sumber kekuasaan dan bakat-bakat yang terdapat dalam masyarakat, langsung maupun tidak langsung menguntungkan kepentingan partai.

B. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi, menurut Gabriel Almond dan G. Bingham Powell, rekrutmen politik tergantung pula kepada proses seleksi dalam partai politik itu sendiri. Organisasi partai politik secara berkesinambungan berusaha untuk merekrut anggotanya ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu, dan mobilisasi partisipasi politik mereka. Untuk kepentingan – kepentingan partai yang menguntungkan partai politik membangun dan menyiapkan kader – kader yang dapat di percaya.

C. Jalur Koalisi Partai atau pimpinan – pimpinan partai politik, Rekrutmen politik sering kali tergantung kepada peranan masing-masing partai dalam suatu koalisi. Sehingga berbagai kesepakatan dan pengangkatan politik sering kali atas hasil koalisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup sistem politik suatu negara.

D. Jalur Rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial, Almond dan Powell menyatakan bahwa dalam sistem politik tradisional, rekrutmen politik masih didasarkan kepada hubungan keluarga (*diffuse family*),

hubungan agama (religious), dan pertalian keluarga berdasarkan perkawinan, misalnya sistem politik monarki anak raja otomatis akan menggantikan ayahnya jika sang ayah wafat.

Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya. Apabila kita mengkaji pola-pola tersebut maka kita akan mengetahui bahwa sistem nilai, perbedaan derajat, serta basis dan stratifikasi sosial terkandung di dalam rekrutmen politik. Hal ini berarti rekrutmen politik mampu membangkitkan posisi. di dalam masyarakat dalam tingkatan peran masyarakat. ini berpengaruh besar dalam hubungan antar masyarakat. Pola-pola rekrutmen politik ini secara tidak disengaja menjadi indikator yang cukup penting untuk melihat pembangunan dan perubahan suatu negara. Di dalam pola-pola ini memiliki keterkaitan antara rekrutmen dan perekonomian suatu negara mampu mengkaji pergeseran ekonomi masyarakat, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat, artinya pemimpin-pemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang mengarah demi kemajuan negaranya serta faktor politik menciptakan terjadinya iklim politik yang cukup mempengaruhi pergerakan ekonomi suatu negara di dalamnya .

Syamsuddin haris, dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksiaan rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan

sebagainya.¹⁶ Lebih singkatnya bahwa rekrutmen politik adalah proses kaderisasi. Sejumlah teori menyebutkan bahwa seleksi kandidat merupakan tahap kunci dan tahap yang menentukan. Karena dari proses rekrutmen itulah akan dihasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa yang akan memerintah.

Berangkat dari serangkaian pengertian konsep rekrutmen politik maka pada studi ini maka akan pendekatan ini akan digunakan penulisan ini untuk menjelaskan fenomena rekrutmen partai amanat nasional yang dikaitkan dengan dinamika elit didalamnya .

2.3 Kerangka Pikir

Pemilihan Umum 2019 menjadikan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Makassar sebagai partai yang mengantongi kursi di tingkat Kota Makassar sebanyak lima kursi dibandingkan pada pemilu 2014 sebanyak empat kursi. Tentunya salah satu faktor yang menyebabkan partai amanat nasional mendapatkan penambahan kursi itu dikarenakan komposisi calon anggota legislatif yang memiliki kekuatan elektoral dimasing –masing wilayah (Dapil) hal itu dapat dilihat dari proses penentuan daftar calon anggota legislatif di Kota Makassar berdasarkan daftar calon legislatif sementara diDapil 1 berjumlah 21 calon. Diantara 21 calon tersebut ditetapkan 9 calon tetap dimana daftar calon tetap ada beberapa nama yang tidak mendaftarkan didaftar calon sementara tiba-tiba dimasukkan

¹⁶ Sahid., *Memahami Mosiologi*, h.128

kedalam daftar calon tetap yaitu Dra. Andi Sitti Rahmatiah Matturungan DG Sore s.pd,mpd , Dedi Amiruddin Karded SE ,syukran kahfi, yang mempunyai hubungan kedekatan dengan elit partai yang merupakan Kolega ketua DPD dan anak ketua DPW Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Penulis menemukan diantara 21 daftar calon sementara terdapat beberapa nama yang merupakan pengurus dalam Partai Amanat Nasional (PAN). Diantaranya yaitu rasmi ridjang sikati selaku wakil sekertaris (PAN) DPD Kota Makassar, andi fakaruddin sebagai wakil ketua (PAN) DPD Kota Makassar ,rohani selaku pengurus kerja sama antar lembaga (PAN) Kota Makassar ,askari umar tatta selaku wakil sekertaris (PAN) Kota Makassar Dengan kehadiran beberapa pengurus yang menduduki jabatan strategis menjadikan PAN berpotensi meningkatkan perolehan suara dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Namun, dengan dominasi kandidat yang dianggap berpotensi, para kandidat yang terbilang pengurus dalam Partai Amanat Nasional mendapati posisi yang dinilai kurang menyenangkan dalam penentuan daftar calon tersebut

2.4 Skema Pikir

